



TERINTEGRASI DENGAN DATA PEMKOT Pelaku Wisata Wajib Pasang 'QR Code'

YOGYA (KR) - Pemberlakuan kode khusus atau 'QR Code' akan diwajibkan bagi para pelaku wisata. Tidak hanya destinasi melainkan kalangan industri mulai dari akomodasi perhotelan atau penginapan, usaha oleh-oleh, toko kuliner maupun layanan jasa yang berhubungan dengan wisatawan.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menjelaskan pihaknya akan membantu penyediaan sistem untuk pemasangan 'QR Code' tersebut. "Itu menjadi aturan baku bagi pelaku wisata. Kita akan membuat platform yang bisa digunakan bersama-sama," urainya di sela koordinasi dengan para pelaku wisata

secara virtual, Selasa (16/6).

Penggunaan 'QR Code' tersebut ditujukan untuk memudahkan proses pemantauan setiap pengunjung yang masuk Kota Yogya. Begitu pengunjung memindai kode ketika memasuki wilayah tertentu, maka datanya akan terintegrasi dengan Pemkot. Sehingga ketika ada temuan kasus positif, upaya penelusuran pun akan lebih mudah dilakukan.

Heroe mengaku penerapan 'QR Code' sudah disimulasikan di kawasan Malioboro. Akan tetapi sistem itu masih dinilai cukup sederhana, sehingga ke depan akan dilakukan berbagai pengembangan. "Kalau yang sekarang ini kan begitu memindai, muncul

kolom berupa nama dan nomor telepon yang harus diisi oleh pengunjung. Ke depan tentu tidak sekedar begitu tetapi ada benefit yang bisa dinikmati pengunjung," terangnya.

Benefit tersebut antara lain berbagai diskon atau promosi destinasi dan produk wisata, agenda wisata maupun hadiah menarik yang memikat pengunjung. Dengan demikian, para pelaku wisata juga bisa menjadikan 'QR Code' sebagai ajang promosi usahanya. Akan tetapi, sebelum industri pariwisata dibuka ke publik, pengelola harus sudah memiliki standar atau protokol yang wajib dijalankan. "Kenapa 'QR Code' ini kita wajibkan karena banyak kasus penularan itu

karena bersinggungan dengan luar kota. Kita harus betul-betul disiplin mengantisipasi agar tidak muncul kasus baru ketika nanti *new normal* sudah berlaku," papar Heroe.

Pemberlakuan 'QR Code' bagi pelaku usaha pariwisata itu pun mendapat sambutan positif dari para pengelola. Kebijakan itu dinilai menjadi solusi dalam mengendalikan kasus baru sekaligus momentum kebangkitan pariwisata di Kota Yogya. Hanya, para pelaku wisata juga memberikan usulan salah satunya jaminan protokol bisa dijalankan dengan baik. Sehingga diusulkan adanya sanksi bagi pelanggar, baik sanksi dari kalangan pengelola maupun pengunjung. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005